

BIAYA TENAGA KERJA BORONGAN PADA USAHATANI TANAMAN PANGAN MENURUT KELEMBAGAAN LAHAN DAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL

SUWARTO

Staf Pengajar Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian UNS

Masuk 12 Juli 2010; Diterima 10 Agustus 2010

ABSTRACT

This research aims to investigate the cost expenditure of contract labor for food crops farm as effect of land and labor institutions in Gunung Kidul Regency. Cost expenditure for contract labor of owner-operator farmer is higher than cost for HB tenant farmer. Most of HB tenant is in region far from city with bad transportation facility. In addition, volume of farm worker owner farmer may be greater due to area of owner-worker farmer have wider relative to area held by HB tenant farmer. In this case, there is no difference in cost expenditure for contract labor among the owner-operator farmers, LKP land tenant, and forestry land borrower.

The cost expenditure for contract labor of farmers per ha who employs labors of upahan, royongan, and arisan or RTan is higher than the cost for farmer who cultivates their land by themselves, who mostly living far from the city, rely more on farm and more subsistent. The cost expenditure for contract worker of farmers who employs sambatan is not different with the expenditure for farmers who employ others labor. There is no difference among upahan, royongan, arisan labors in the cost expenditure. The cost expenditure for contract labor of farmers per ha for those with wide land is higher than one those with narrow land.

Keywords: Land, Labor Institution, Cost Expenditure for Contract Labor.

PENDAHULUAN

Kebutuhan tenaga kerja para petani fluktuatif selaras dengan musim dan fase pertumbuhan tanaman. Para petani seringkali menghadapi masalah secara bersama, seperti mengatasi serangan hama atau penyakit, membuat dan memelihara jalan menuju ladang, mencari dan mengelola sumber air, dan dalam menghadapi masalah kehidupan keseharian seperti membangun rumah, dan menjaga keamanan yang memerlukan gotong royong. Para petani terbiasa hidup dengan saling membantu, kerjasama tenaga kerja tersebut melembaga menjadi kelembagaan tenaga kerja. Kelembagaan tenaga kerja di dalamnya terkandung kaidah-kaidah baik formal atau informal yang mengatur penggunaan tenaga kerja atau biaya tenaga kerja dalam suatu masyarakat.

Melalui kelembagaan tenaga kerja memungkinkan para petani dan warga pedesaan untuk menggunakan tenaga kerja luar keluarga dalam masyarakatnya. Kelembagaan tenaga kerja yang bersifat gotong royong, dengan biaya tunai yang murah telah sejak lama berlangsung di

masyarakat Jawa (Fukuda, 1986; Iwamoto *et al.* dalam Hartono, 2003; Subejo dan Iwamoto, 2003). Dalam hal ini Kasryno (1984) mengungkapkan bahwa di Sulawesi Selatan belum ditemukan upah harian, kegiatan usahatani padi mulai dari mengolah lahan, menanam, dan menyang dilakukan dengan saling membantu antar petani. Aktivitas tersebut dikenal dengan *mapparele*. Jenis kelembagaan tenaga kerja dapat beragam dalam bentuk dan namanya pada daerah yang berbeda.

Sebagaimana pada kelembagaan tenaga kerja, lahan usahatani sebagai faktor produksi penting yang ketersediaannya terbatas dan terdistribusi tidak merata menimbulkan kerjasama antara pemilik lahan luas dengan petani berlahan sempit atau petani tidak berlahan dalam suatu kelembagaan lahan (Hayami dan Kikuchi, 1981; Fujimoto, 1996; Sangwan, 2000; Sharma, 2000; Hartono *et al.*, 2001). Kelembagaan lahan yaitu aturan-aturan kerjasama yang disepakati dan dipatuhi oleh suatu masyarakat (Hayami dan Kikuchi, 1981, Kasryno, 1984). Berdasar kelembagaan lahan

tersebut penguasaan lahan dalam usahatani dapat dibedakan atas pemilik penggarap, penyakap, penyewa, dan penerima gadai, atau dapat dibedakan atas petani berlahan luas dan petani berlahan sempit. Di samping itu, kelembagaan lahan juga dapat dibedakan atas jenis lahan yang dikuasai yaitu milik perseorangan (lahan sanggan atau yasan), lahan lungguh, lahan kas desa dan lainnya. Kelembagaan lahan juga dapat berkorelasi dengan kemudahan dan kemampuan petani melakukan komersialisasi usahatani termasuk di dalamnya dalam memanfaatkan tenaga kerja luar keluarga dengan cara borongan.

Pengaruh modernisasi dan komersialisasi terhadap kelembagaan tenaga kerja diungkapkan oleh Hayami dan Kikuchi (1981) bahwa modernisasi dan komersialisasi dapat berdampak melemahkan kelembagaan tenaga kerja non upahan yang berlandaskan sistem kegotongroyongan dan kebersamaan. Iwamoto *et al.* (Hartono, 2003) menjelaskan bahwa akibat kelembagaan yang berkembang ke arah sistem pasar maka kelembagaan tenaga kerja non upahan yang sebelum ini menolong petani kecil karena murah kini banyak digantikan dengan pengupahan yang komersial termasuk di dalamnya pengupahan dengan sistem borongan. Penggunaan tenaga kerja borongan dilakukan para petani di antaranya untuk angkutan pupuk kandang dan hasil panen, dan persiapan lahan.

Kelembagaan tenaga kerja, lahan, lingkungan usahatani yang berupa jarak atau kemudahan akses tempat tinggal petani dengan pasar atau kota dapat berpengaruh terhadap komersialisasi usahatani yang di antaranya dicirikan oleh besarnya biaya tenaga kerja borongan. Oleh karena itu perlu diteliti apakah kelembagaan lahan, tenaga kerja dan lingkungan usahatani mempengaruhi pengeluaran petani untuk biaya tenaga kerja borongan dalam usahatani.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada dua dusun di Kabupaten Gunung Kidul wilayah tenggara, yaitu di Dusun Widoro Wuni, Desa Balong, Kecamatan Girisubo dan di Dusun Candisari, Desa Hargosari, Kecamatan Tanjungsari. Semua petani di kedua dusun yaitu 88 KK di Dusun Widoro Wuni dan 137 KK di Dusun Candisari

dijadikan responden. Dusun Widoro Wuni relatif jauh dari pembinaan, relatif jauh dan sulit mengakses pasar, kurang lebih 37 km sebelah tenggara dari ibu kota kabupaten. Dusun Candisari kurang lebih 12 km, sebelah tenggara dari ibu kota kabupaten relatif dekat dengan pusat pembinaan, mudah mengakses pasar. Pengumpulan data primer penelitian ini dilakukan dari bulan Juli 2005 hingga September 2005.

Para petani responden menurut kelembagaan lahan meliputi petani pemilik penggarap, penyewa lahan lungguh-kas desa-pengare-arem-dan milik perseorangan (LKP), penyewa lahan Hamengku Buwono (HB), dan peminjam lahan kehutanan (berusahatani di antara tanaman jati muda milik kehutanan). Menurut kelembagaan tenaga kerja pada usahatani, petani dapat dikelompokkan atas petani pengguna tenaga kerja upahan, royongan (upah dibayar setelah panen, yaitu pada waktu *bodo* atau *Idul Fitri*, *rasul* yaitu acara selamatan bersih desa, dan pada waktu *17an*), arisan atau RTan, *sambatan*, dan yang hanya menggunakan tenaga sendiri (Lampiran 1).

Metode Analisis data

Uji F atau Anova

Uji F dipergunakan untuk membedakan lebih dari dua rata-rata, pada data yang diasumsikan memiliki varians yang homogen, kecuali jika data yang dianalisis cukup besar, persyaratan tersebut tidak diperlukan (Boedijoewono, 2001). Walaupun demikian, untuk mendapatkan hasil analisis yang lebih baik, merujuk kepada Santosa, *et al.* (2005) dan Santoso (2005) maka homogenitas varians harus diuji, yaitu melalui Levene statistik. Hasil Levene statistik dipergunakan untuk menentukan jenis uji lanjutan yang dipergunakan jika uji F terbukti nyata. Uji F dalam hal ini dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$F \text{ hitung} = \frac{S_a^2}{S_w^2}$$

Keterangan:

$$S_a^2 = \text{variens antar sampel,}$$

$$S_w^2 = \text{variens dalam sampel}$$

$$S_a^2 = \sum_{i=1}^n \frac{(\bar{X}_i - \tilde{X})^2}{(n-1)}$$

Keterangan:

\bar{X} = rata-rata varians dalam suatu sampel,

\tilde{X} = rata-rata varians dari seluruh sampel

n = jumlah kelompok sampel

$$S_w^2 = \sum_{i=1}^n \frac{S_i^2}{n}$$

Keterangan :

n = jumlah kelompok sampel

$$S^2 = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \bar{X})^2}{(n-1)}$$

Keterangan :

S^2 = varians dari setiap pengamatan dalam suatu sampel.

n = jumlah sampel

Uji beda ke empat rata-rata biaya usahatani untuk tenaga kerja upah borongan bagi petani dalam kelembagaan lahan (pemilik penggarap, penyewa lahan *HB*, penyewa lahan *LKP*, peminjam lahan Kehutanan) dengan formulasi pengujian sebagai berikut:

$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4$, artinya biaya tenaga kerja upah borongan bagi para petani pada keempat kelompok kelembagaan lahan tidak berbeda

$H_a: \mu_1 \neq \mu_2 \neq \mu_3 \neq \mu_4$, artinya biaya tenaga kerja upah borongan bagi para petani pada keempat kelompok kelembagaan lahan sekurang-kurangnya ada sepasang yang berbeda.

Kaidah pengujian, jika pada tingkat kesalahan 5% $F_{hitung} > F_{tabel}$ berarti tolak H_0 dan terima H_a . Jika uji F nyata, uji selanjutnya untuk membeda-kan dua rata-rata biaya usahatani untuk tenaga kerja borongan menggunakan *Post Hoc Test* pada program SPSS 12. Pemilihan jenis uji lanjut (*Post Hoc Test*) dalam hal ini memperhatikan hasil *test of homogeneity of variances*, yaitu menggunakan *Levene* statistik. Menurut *Levene* statistik, varians keempat kelompok data homo-gen, jika nilai taraf nyata $> 5\%$, atau sebaliknya jika *Levene* statistik mendapatkan taraf nyata $< 5\%$. Uji lanjut (*Post Hoc Test*), jika varians ke-empat data homogen maka dapat menggunakan salah satu dari uji *LSD*, *Tukey HSD*, *Bonferroni*, *Sidak*, dan *Gabril*. Sebaliknya, jika kelompok-kelompok data mempunyai varians tidak homogen, maka uji lanjut dapat menggunakan salah satu dari uji

Tamhane, *Dunnet*, dan *Games Howell* (Santosa, *et al.*, 2005; Santosa, 2005).

Uji beda biaya usahatani untuk tenaga kerja upah borongan berdasarkan kelembagaan tenaga kerja pada usahatani (*upahan*, *royongan*, *arisan* atau *RTan*, *sambatan*, dan *sendiri*) dengan formulasi sebagai berikut.

$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4 = \mu_5$, artinya biaya tenaga kerja upah borongan bagi para petani pada kelima kelompok kelembagaan tenaga kerja tidak berbeda

$H_a: \mu_1 \neq \mu_2 \neq \mu_3 \neq \mu_4 \neq \mu_5$, artinya biaya tenaga kerja upah borongan bagi para petani pada kelima kelompok kelembagaan tenaga kerja sekurang kurangnya ada sepasang yang berbeda.

Kaidah pengujian, jika pada tingkat kesalahan 5% $F_{hitung} > F_{tabel}$ berarti tolak H_0 dan terima H_a . Jika uji F nyata, uji selanjutnya untuk memban-dingkan dua nilai rata-rata biaya tenaga kerja upah borongan berdasarkan kelembagaan tenaga kerja menggunakan *Post Hoc Test* program SPSS 12, sebagaimana yang dipergunakan pada uji beda biaya tenaga kerja upah borongan berdasarkan kelembagaan lahan.

Uji t

Uji t untuk mengetahui perbedaan dari dua nilai rata-rata merujuk kepada *Steel* dan *Torrie* (1989) diformulasikan sebagai berikut:

$$t\text{-hitung} = \frac{|\bar{X}_1 - \bar{X}_2|}{\sqrt{S^2 \left(\frac{1}{nX_1} + \frac{1}{nX_2} \right)}}$$

Keterangan:

\bar{X}_1, \bar{X}_2 = kedua nilai rata-rata dari kedua kelompok petani yang diperbandingkan;

nX_1 = jumlah petani dari kelompok pertama,

nX_2 = jumlah petani dari kelompok kedua,

s^2 = *variance* gabungan dari kedua kelompok petani yang diperbandingkan.

Variance gabungan dari kedua kelompok petani yang diperbandingkan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$S^2 = \left(\frac{S^2 X_1}{nX_1} \right) + \frac{\left(\frac{S^2 X_2}{nX_2} \right)}{nX_1 + nX_2 - 2}$$

Keterangan:

$s^2 X_1$ = *variance* dari kelompok petani pertama,

s^2X_2 = variance dari kelompok petani kedua.

Dalam hal ini pelaksanaan pengujian, uji t selanjutnya menggunakan program SPSS 12 (Santoso, 2005).

Uji beda dua rata-rata biaya tenaga kerja upah borongan bagi para petani dalam disparitas luas penguasaan lahan dan kemudahan mengakses pekerjaan luar usahatani berdasarkan tempat tinggal petani menggunakan uji-t dengan formulasi sebagai berikut.

H_0 : \bar{X}_1, \bar{X}_2 , artinya biaya tenaga kerja upah borongan bagi petani yang menguasai lahan luas, atau lebih mudah mengakses pekerjaan luar usahatani tidak berbeda dari biaya tenaga kerja upah borongan bagi petani secara berturut-turut yang menguasai lahan sempit, atau relatif sulit mengakses pekerjaan luar usahatani.

H_a : $\bar{X}_1 \neq \bar{X}_2$, artinya biaya tenaga kerja upah borongan bagi para petani yang menguasai lahan luas, atau lebih mudah mengakses pekerjaan luar usahatani berbeda dengan biaya tenaga kerja upah borongan bagi para petani secara berturut-turut yang menguasai lahan sempit, atau relatif sulit mengakses pekerjaan luar usahatani.

Kaidah pengujian, jika pada tingkat kesalahan 5% t-hitung > t-tabel berarti tolak H_0 dan terima H_a .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biaya Tenaga Kerja Borongan

Tenaga kerja *borongan* pada umumnya dipergunakan untuk angkutan, baik input (pupuk kandang) dan hasil panen. Para petani menggunakan upah *borongan*, yaitu menggunakan jasa angkutan dengan mobil terutama yang lahan usahatannya dekat dengan jalan yang dapat dilalui mobil pengangkut. Dalam prakteknya, satu mobil *colt* pengangkut sering kali dipergunakan untuk mengangkut hasil tanaman oleh beberapa orang petani secara bersama yang letak ladangnya saling berdekatan. Di samping itu, upah borongan juga dilakukan oleh sebagian petani untuk membajak lahan.

Sebagaimana data pada tabel 1, penggunaan biaya tenaga kerja *borongan* para petani yang dekat kota, sesuai kelembagaan lahan rata-rata Rp 67.000,- per ha per tahun oleh para petani *pemilik penggarap* relatif lebih besar dari penggunaan biaya tenaga kerja *borongan* bagi para petani dalam kelembagaan lahan lainnya. Demikian pula penggunaan biaya tenaga kerja borongan petani *pemilik penggarap* yang jauh dari kota, rata-rata Rp 20.000,- per ha per tahun relatif lebih besar dari penggunaan biaya tenaga kerja *borongan* bagi para petani dalam kelembagaan lahan lainnya.

Tabel 1. Rata-rata Biaya Tenaga Kerja Borongan pada Usahatani di Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2005 dalam Ribuan Rupiah per ha

Kel. Naker.	Kelembagaan Lahan				Rata-rata
	Milik	Sewa LKP	Sewa LHB	Pnj. LHut	
Relatif dekat dengan kota atau pasar, mudah mengakses pekerjaan luar usahatani (1)					
Upahan	85	188	0	63	92
Royongan	69	33	0	0	63
Arisan/Rtan	78	64	30	64	73
Sambatan	33	0	0	0	33
Sendiri	22	0	0	0	16
Rata-rata (1)	67	63	17	25	63
Relatif jauh dari kota atau pasar, sulit mengakses pekerjaan luar usahatani (2)					
Upahan	40	0	33	0	39
Royongan	43	0	0	0	33
Arisan/Rtan	8	0	31	0	13
Sambatan	8	0	0	0	8
Sendiri	9	0	0	0	6
Rata-rata (2)	20	0	9	0	17
Rata ² (1&2)	49	56	11	25	45

Sumber: Analisis Data Primer

Keterangan: LKP = lahan lungguh, Kas Desa, *pengare-are*, dan milik perseorangan,
 LHB = lahan milik Hamengku Buwono,
 Pnj. LHut = pinjam lahan milik Kehutanan

Penggunaan biaya tenaga kerja *borongan* para petani yang dekat kota, sesuai kelembagaan tenaga kerja rata-rata Rp 92.000,- per ha per tahun oleh para petani yang menggunakan tenaga kerja *upahan*, relatif lebih besar dari penggunaan biaya tenaga kerja *borongan* bagi para petani dalam kelembagaan tenaga kerja lainnya. Demikian pula penggunaan biaya tenaga kerja *borongan* petani yang menggunakan tenaga kerja *upahan*, yang jauh dari kota, rata-rata Rp 39.000,- per ha per tahun relatif lebih besar dari penggunaan biaya tenaga kerja *borongan* bagi petani dalam kelembagaan tenaga kerja lainnya.

1. Biaya Tenaga Kerja Borongan menurut Kelembagaan Lahan

Perbedaan besarnya biaya tenaga kerja *borongan* per ha per tahun yang dipergunakan

para petani menurut kelembagaan lahan dapat dijelaskan dengan *anova*. Hasil *anova* menunjukkan F-hitung nyata pada taraf kesalahan 5%, berarti rata-rata biaya tenaga kerja *borongan* oleh para petani pada kelembagaan lahan berbeda. Hasil analisis menunjukkan bahwa *varians* data tidak homogen, hal tersebut ditunjukkan oleh hasil *Levene* tes nyata. Oleh karena itu uji lanjut untuk mengetahui perbedaan biaya tenaga kerja *borongan* menurut kelembagaan lahan pada usahatani dapat menggunakan uji *Tamhane*, *Dunnet*, dan *Games Howell* (Santosa, *et al.*, 2005; Santosa, 2005). Dalam hal ini hasil ketiga uji relatif sama dan selanjutnya hasil uji lanjutan dengan *Games-Howel* dipergunakan untuk menjelaskan uji beda biaya tenaga kerja *borongan* pada usahatani sesuai kelembagaan lahan.

Tabel 2. Rata-rata Biaya Tenaga Kerja Borongan Berdasarkan Kelembagaan Lahan di Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2005

Kelembagaan Lahan	Kepala Keluarga (orang)	Naker. borongan ribuRp/ha	Post Hoc Test (Games-Howel)			
			(I) Lahan	(J) Lahan	Beda Nilai (I-J) ribuRp/ha	Taraf Nyata
Pemilik	186	49,47	Pemilik	Sewa LKP	-6,75	0,994
				SewaLHB	38,51*	0,000
				Pnj. LHut	24,07	0,515
Sewa LKP	9	52,22	Sewa LKP	Pemilik	6,75	0,994
				SewaLHB	45,26	0,390
				Pnj. LHut	30,82	0,752
SewaLHB	25	10,96	SewaLHB	Pemilik	-38,51*	0,000
				Sewa LKP	-45,26	0,390
				Pnj. LHut	-14,44	0,812
Pnj. LHut	5	25,40	Pnj. LHut	Pemilik	-24,07	0,515
				Sewa LKP	-30,82	0,752
				SewaLHB	14,44	0,812
Jumlah	225	44,93				

Sumber: Analisis Data Primer

Keterangan: LKP = lahan lungguh, Kas Desa, *pengarem-arem*, dan milik perseorangan,
 HB = lahan milik Hamengku Buwono,
 Pnj. LHut = pinjam lahan Kehutanan,
 F-hitung = 2,685*;
 *) = nyata pada $\alpha = 5\%$.

Hasil uji beda pada tabel 2 menurut kelembagaan lahan, diketahui pengeluaran biaya usahatani tanaman pangan untuk tenaga *borongan* petani *pemilik penggarap* lebih besar dari biaya tersebut bagi petani penyewa lahan HB. Para petani pemilik penggarap 88% berada relatif dekat dengan kota, sebaliknya para petani

penyewa lahan HB 72% berada di wilayah yang jauh dari kota dengan sarana dan prasarana angkutan masih buruk. Di samping itu, volume usahatani pemilik penggarap dapat lebih besar mengingat luas penguasaan lahan petani pemilik penggarap rata-rata 0,61 ha relatif lebih luas dari

penguasaan lahan penyewa lahan HB yaitu rata-rata seluas 0,40 ha (Lampiran 1).

Biaya untuk tenaga kerja *borongan* per ha per tahun antara para petani pemilik penggarap, penyewa lahan LKP, dan peminjam lahan Kehutanan tidak berbeda. Dalam hal ini sebagian besar petani pemilik penggarap, penyewa lahan LKP dan semua petani peminjam lahan Kehutanan bertempat tinggal relatif dekat kota, dengan sarana prasarana angkutan relatif tersedia.

2. Biaya Tenaga Kerja Borongan menurut Kelembagaan Tenaga Kerja

Besarnya biaya tenaga kerja *borongan* per ha per tahun yang dipergunakan para petani menurut kelembagaan tenaga kerja pada usahatani dapat dijelaskan dengan *anova*. Hasil *anova* menunjukkan F-hitung nyata pada taraf

kesalahan 5%, berarti rata-rata biaya tenaga kerja borongan oleh para petani pada kelembagaan tenaga kerja berbeda. Hasil analisis menunjukkan bahwa *varians* data tidak homogen, hal tersebut ditunjukkan oleh hasil *Levene* tes nyata. Oleh karena itu uji lanjut untuk mengetahui perbedaan biaya tenaga kerja borongan menurut kelembagaan tenaga kerja pada usahatani dapat menggunakan uji *Tamhane*, *Dunnet*, dan *Games Howell* (Santosa, *et al.*, 2005; Santosa, 2005). Dalam hal ini hasil uji lanjutan dengan *Games-Howel* mendapatkan hasil relatif lebih baik (Lampiran 11b), dan selanjutnya dipergunakan untuk menjelaskan hasil uji beda biaya tenaga kerja *borongan* menurut kelembagaan tenaga kerja pada usahatani.

Tabel 3. Rata-rata Biaya Tenaga Kerja Borongan Berdasarkan Kelembagaan Tenaga Kerja di Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2005

Kelembagaan Tenaga Kerja	Kepala Keluarga (orang)	Naker borongan ribuRp/ha	Post Hoc Test (Games-Howel)			
			(I) Naker	(J) Naker	BedaNilai (I-J) ribuRp/ha	Taraf Nyata
Upahan	40	72,28	Upahan	Royongan	16,04	0,830
				Arisan/Rtan	18,05	0,786
				Sambatan	54,48	0,054
				Sendiri	62,22*	0,001
Royongan	56	56,23	Royongan	Upahan	-16,04	0,830
				Arisan/Rtan	2,00	1,000
				Sambatan	38,43	0,148
				Sendiri	46,18*	0,000
Arisan/Rtan	61	54,23	Arisan/RTan	Upahan	-18,05	0,786
				Royongan	-2,00	1,000
				Sambatan	36,43	0,205
				Sendiri	44,18*	0,000
Sambatan	10	17,80	Sambatan	Upahan	-54,48	0,054
				Royongan	-38,43	0,148
				Arisan/Rtan	-36,43	0,205
				Sendiri	7,75	0,982
Sendiri	58	10,05	Sendiri	Upahan	-62,22*	0,001
				Royongan	-46,18*	0,000
				Arisan/Rtan	-44,18*	0,000
				Sambatan	-7,75	0,982
Jumlah	225	44,93				

Sumber:

Analisis Data Primer

Keterangan: F-hitung= 7,926*; *)= nyata pada $\alpha = 5\%$.

Biaya tenaga kerja borongan per ha per tahun oleh para petani yang menggunakan tenaga kerja *upahan*, *royongan*, dan *arisan* atau *RTan* lebih tinggi dari biaya tersebut bagi para petani yang mengerjakan sendiri usahatannya. Para petani yang menggunakan tenaga kerja *upahan*, *royongan*, dan *arisan* atau *RTan* menguasai lahan pangan kurang lebih 0,500 ha, lebih luas dari

penguasaan lahan petani yang tidak menggunakan tenaga kerja luar keluarga yaitu 0,200 ha. Para petani yang mengerjakan sendiri usahatannya lebih banyak bertempat tinggal jauh dari kota dan lebih *subsisten*.

Biaya tenaga kerja *borongan* para petani yang menggunakan tenaga kerja *sambatan* pada taraf nyata 0,054 lebih rendah dari biaya tersebut

Suwarto : Biaya Tenaga Kerja Borongan Pada Usahatani ...

bagi para petani yang menggunakan tenaga kerja *upahan*. Dalam hal ini para petani yang menggunakan tenaga kerja *upahan* menguasai lahan usahatani lebih luas (Tabel 3), dan skala usahatani yang dapat lebih besar dari skala usahatani para petani yang menggunakan tenaga kerja *sambatan*.

Biaya tenaga kerja *borongan* para petani yang menggunakan tenaga kerja *upahan*, *royongan*, dan *arisan* tidak berbeda nyata, hal tersebut dapat disebabkan oleh luas penguasaan lahan (Tabel 3), jenis usaha, dan lingkungan fisik yang relatif sama.

3. Biaya Tenaga Kerja Borongan menurut Luas Penguasaan Lahan dan Lingkungan Fisik Usahatani

Biaya tenaga kerja *borongan* yang dipergunakan para petani menurut luas lahan yang dikuasai dan lingkungan fisik usahatani yang berkenaan dengan ketersediaan sarana dan prasarana angkutan dapat berbeda. Hasil analisis uji t, pada Tabel 4 menunjukkan bahwa biaya tenaga kerja *borongan* per ha per tahun para petani berlahan luas ($\geq 0,5$ ha) lebih tinggi dari biaya tersebut oleh para petani berlahan sempit ($< 0,5$ ha). Hal tersebut dapat berkenaan dengan skala usaha, komersialisasi usahatani, dan kemampuan menggunakan jasa tersebut. Dalam hal ini para petani berlahan luas memperoleh pendapatan rumah tangga yang lebih besar dari pendapatan tersebut bagi para petani berlahan sempit (Lampiran 3).

Tabel 4. Rata-rata Biaya Tenaga Kerja Borongan pada Usahatani Berdasarkan Luas Lahan Usahatani dan Tempat Tinggal Petani di Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2005

Lahan dan Lingkungan Fisik	Jum.Petani (KK)	Naker Borongan ribuRp/ha	Keterangan
Luas Lahan TP			Beda naker borongan ribuRp = 23,20,-* t-hit= 2,59
1. $\geq 0,5$ ha	81	59,78	
2. $< 0,5$ ha	144	36,58	
Lokasi			Beda naker borongan ribuRp = 45,69,-* t-hit= 6,13
1. Dekat dengan kota	137	62,80	
2. Jauh dari kota	88	17,11	

Sumber: Analisis Data Primer

Keterangan: TP= tanaman pangan, *)= nyata pada $\alpha=5\%$

Biaya tenaga kerja *borongan* para petani yang bertempat tinggal relatif dekat kota lebih tinggi dari biaya tersebut bagi para petani yang jauh dari kota. Hal tersebut dapat berkenaan dengan komersialisasi usahatani sesuai ketersediaan sarana dan prasarana transportasi. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian mengenai penggunaan tenaga kerja luar keluarga harian. Para petani yang bertempat tinggal jauh dari kota, relatif sulit mengakses pekerjaan luar usahatani lebih banyak memelihara ternak. Ternak tersebut dikandangkan di ladang sebagai upaya mendekatkan ternak dengan pakan dan air, para petani yang jauh dari kota tiap hari ke ladang, lebih banyak menggunakan tenaga sendiri untuk usahatani. Sebaliknya para petani yang relatif dekat kota memperoleh pendapatan luar usahatani dan pendapatan rumah tangga yang lebih dari pendapatan tersebut bagi para petani yang jauh dengan kota (Lampiran 2 dan 3).

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

- Para petani pemilik penggarap lebih banyak mengeluarkan biaya tenaga kerja borongan dari pengeluaran biaya tersebut bagi para petani peminjam lahan milik Kehutanan. Para petani yang menguasai lahan luas lebih banyak mengeluarkan biaya untuk tenaga kerja borongan dari pengeluaran biaya tersebut bagi para petani yang menguasai lahan sempit. Para petani pemilik penggarap dan para petani berlahan luas memiliki derajat komersial lebih baik.
- Para petani yang menggunakan tenaga kerja luar keluarga untuk usahatani baik tenaga kerja upahan, royongan, arisan atau RTan mengeluarkan biaya tenaga kerja borongan lebih besar dari pengeluaran tersebut untuk para petani yang tidak menggunakan tenaga kerja luar keluarga untuk usahatannya.

Suwarto : Biaya Tenaga Kerja Borongan Pada Usahatani ...

Antara petani yang menggunakan tenaga kerja *sambatan* dalam usahatani dengan para petani yang mengerjakan sendiri usahatannya tidak terdapat perbedaan dalam pengeluaran biaya tenaga kerja borongan.

- c. Para petani yang jauh dari kota relatif subsisten, mengeluarkan biaya tenaga kerja borongan lebih rendah dari biaya tersebut bagi para petani yang relatif lebih dekat dengan kota.

Implikasi Hasil Penelitian

- a. Para petani pemilik penggarap relatif lebih banyak bertempat tinggal dekat dengan kota, para petani dekat kota memiliki sarana dan prasarana transportasi relatif lebih baik, menggunakan biaya tenaga borongan lebih tinggi, cenderung komersial. Sejalan dengan itu, untuk menumbuhkan komersialisasi usahatani diperlukan perbaikan dalam penyelenggaraan sarana dan prasarana transportasi.
- b. Para petani yang berlahan luas memiliki pendapatan rumah tangga yang lebih besar, menggunakan biaya tenaga borongan lebih tinggi, cenderung komersial. Sejalan dengan itu, untuk menumbuhkan komersialisasi usahatani diperlukan perbaikan dalam luasan penguasaan lahan menuju skala usaha optimal yang memungkinkan komersialisasi usahatani.

DAFTAR PUSTAKA

Boedijoewono, N. 2001. Pengantar Statistik Ekonomi dan Perusahaan. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

Fukuda, M., 1986. "Transition in The Traditional Rice Harvesting System in A Javanese Village." Fujimoto, A. and T. Matsuda (eds). *An Economic Study of Rice Farming in West Java, A Farm Household Survey of Two Villages in Bandung and Subang*. Nodai Research Institute Tokyo University of Agriculture, DGHE-JSPS PROGRAM, Tokyo:128-139.

Hartono, S., N. Iwamoto, and S. Fukui, 2001. "Characteristics of Farm Household

Economy and Its Flexibility, A Case Study in Central Java Villages." Proceedings of The 1st Seminar, *Toward Harmonization between Development and Environmental Conservation in Biological Production*, February 21-23, 2001, Yayoi Auditorium Graduate School of Agricultural and Life Sciences, The University of Tokyo, Japan: 23-30.

- Hartono, S., 2003. "Pengembangan Bisnis Petani Kecil." Sri Widodo (ed). *Peranan Agribisnis Usaha Kecil dan Menengah untuk Memperkokoh Ekonomi Nasional*. Liberty, Yogyakarta:11-26.
- Hayami, Y., and M. Kikuchi, 1981. *Asian Village Economy at the Crossroads, An Economic Approach to Institutional Change*. University of Tokyo Press.
- Kasryno, F., 1984. "Kerangka Analisa Ekonomi Masalah Pedesaan." Kasryno, F. (ed). *Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta:26-42.
- Sangwan, S.S., 2000. "Emerging Credit Demand of Tenants in Haryana." *Indian Journal of Agricultural Economics*. Indian Society of Agricultural Economics, Mumbai. 55 (3): 317-330.
- Santoso, S., 2005. *Menguasai Statistik di Era Informasi dengan SPSS 12*. PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Santosa, P.B. dan Ashari, 2005. Analisis Statistik dengan Microsoft Exel dan SPSS. Andi, Yogyakarta.
- Sharma, H.R., 2000. "Tenancy Relation in Rural India: A Temporal and Cross-Sectional Analysis." *Indian Journal of Agricultural Economics*. Indian Society of Agricultural Economics, Mumbai. 55 (3): 295-307.
- Steel, R.G.D., dan J.H. Torrie, 1989. *Prinsip dan Prosedur Statistik, Suatu Pendekatan Biometrik*. Gramedia, Jakarta.
- Subejo, and N. Iwamoto, 2003. "Labor Institution in Rural Java, A Case Study in Yogyakarta Province." Working Paper Series, Departement of Agricultural and Resource Economics, The University of Tokyo.

Suwarto : Biaya Tenaga Kerja Borongan Pada Usahatani ...

Lampiran 1. Petani Responden berdasarkan Kelembagaan Lahan dan Tenaga Kerja pada Usahatani di Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2005

Kel. Naker	Kelembagaan Lahan											
	Milik		Sewa LKP		Sewa LHB		Pnj Lhut		Jumlah		UT	TP
	KK	%	KK	%	KK	%	KK	%	KK	%	ha/KK	ha/KK
Lokasi dekat dengan pasar/pekerjaan luar usahatani (1)												
Upahan	22	19	2	25	0	0	1	20	25	18	0,64	0,49
Royongan	39	33	2	25	1	14	2	40	44	32	0,69	0,52
Arisan	36	31	1	12	4	57	1	20	42	31	0,64	0,46
Sambatan	4	3	0	0	0	0	0	0	4	3	0,47	0,29
Sendiri	16	14	3	38	2	29	1	20	22	16	0,24	0,20
Jum(1)	117	85	8	6	7	5	5	4	137	100		
Ha/KK	0,62 ¹	0,45 ²	0,39 ¹	0,25 ²	0,49 ¹	0,41 ²	0,38 ¹	0,38 ²			0,58	0,44
Lokasi jauh dengan pasar/pekerjaan luar usahatani (2)												
Upahan	14	20	0	0	1	5	0	0	15	17	0,66	0,52
Royongan	9	13	0	0	3	17	0	0	12	14	1,007	0,57
Arisan	15	22	0	0	4	22	0	0	19	21	0,61	0,53
Sambatan	6	9	0	0	0	0	0	0	6	7	0,62	0,33
Sendiri	22	36	1	100	10	56	0	0	36	41	0,34	0,25
Jum(2)	69	78	1	0	18	21	0	0	88	100		
Ha/KK	0,61 ¹	0,43 ²	0,30 ¹	0,28 ²	0,40 ¹	0,34 ²	0,00 ¹	0,00 ²			0,57	0,41
Jum1+2	186	83	9	4	25	11	5	2	225	100		
1+2	0,61 ¹	0,44 ²	0,34 ¹	0,26 ²	0,42 ¹	0,36 ²	0,38 ¹	0,38 ²			0,58	0,42
Ha/KK												

Sumber: Analisis Data primer

Keterangan: LKP= lahan lungguh, kas desa, *pengarem-arem*, dan milik perseorangan,
LHB = lahan milik Hamengku Buwono,
Pnj. Lhut= pinjam lahan Kehutanan,
UT = lahan usahatani,
TP= lahan tanaman pangan, ¹) = UT, ²)=TP

Lampiran 2. Rata-rata Pendapatan Luar Usahatani Berdasarkan Luas Lahan Usahatani dan Tempat Tinggal Petani di Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2005

Lahan dan Lingkungan Fisik	Jum.Petani (KK)	Pendapatan Luar Usahatani (ribuRp/th)	Keterangan
Luas Lahan TP			Beda pendapatan (Ribu Rp) = 200,08
1. ≥0.5ha	81	2.328,26	t-hit= 0,666
2. <0.5ha	144	2.128,18	
Lokasi			Beda pendapatan (Ribu Rp) = 1.832,29*
1. Dekat dengan kota	137	2.952,41	t-hit=7,893
2. Jauh dari kota	88	1.120,13	

Sumber: Analisis Data Primer

Keterangan: TP= tanaman pangan, *)= nyata pada $\alpha=0,05$

Lampiran 3. Pendapatan Rumah Tangga Tani Berdasarkan Luas Lahan Usahatani dan Lokasi Tempat Tinggal Petani Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2005

Lahan dan Lingkungan Fisik Usahatani	Jum.Petani (KK)	Pendapatan RT (ribuRp)	Keterangan
Luas Lahan UT			Beda pendapatan RT = Rp 1.347.610,-*
1. ≥0.5ha	121	5.447,62	t hit= 4,150
2. <0.5ha	104	4.100,01	
Lokasi			Beda pendapatan RT = Rp 1.390.230,-*
1. Dekat dengan kota	137	5.368,36	t hit= 4,832
2. Jauh dari kota	88	3.978,39	

Sumber: Analisis Data Pimer

RT= rumah tangga, UT= usahatani, *)= nyata pada $\alpha = 5\%$.